

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen SOP AP merupakan salah satu kewajiban sebagaimana tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP AP) ini diperlukan data dan informasi serta bantuan pengarahan dan bimbingan. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan serta dorongan dari seluruh pihak hingga terselesaikannya penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) ini.

Kami menyadari bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta keterbatasan dari Tim penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) ini. Kami berharap hasil penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Bappeda-Litbang ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan
Penelitian Pengembangan

Kepala

Ir.H. Jonior Hafis, MP
NIP. 19620624 198701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
3. MANFAAT	2
II. PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN	4
III. KESIMPULAN DAN SARAN	7
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT	
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEREKONOMIAN SDA DAN INFRASTRUKTUR	
4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	